

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI ERA SIBER

Sri Filda,¹ Isbon Pageno,^{2*} Rusmawaty Bte, Rusdin^{3*}

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; srifilda@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;

*Correspondence :

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Partisipasi, Politik, Masyarakat, Pemilihan, Desa Bambapula.*

Received. : 26 Juli

Revised. : 30 Juli

Accepted : 15 Agustus

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli Tahun, 2019. Penelitian ini menggunakan teori Miriam Budiardjo berdasarkan 3 aspek yaitu pemberian suara, menghadiri rapat umum, dan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli Tahun, 2019, bahwa dalam pemberian suara sudah maksimal, namun dalam menghadiri rapat umum dan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, belum maksimal karena ada beberapa faktor pendidikan, tingkat pekerjaan, tingkat kekeluargaan, dan tingkat kedudukan.

ABSTRACT

This Study aims to find out how Community Political Participation, in Village Head Election, in Bambapula Village, North Dampal District, Toli-Toli Regency in 2019. This research uses teon, Miriam Budiardjo based on 3 aspect, namely voting to attend general meetings, and forming ang joining intereset groups. This research uses a qualitative approach with descriptive research type data, collection, techniques using observation, interviews (interviews), and documentation. Research result on, community Political Participation, in, Village Head Elections in, Bambapula Village, North Dampal District, Toli-Toli Regency Year 2019, that in, voting is not maximal but attending general meetings and forming an, joining intereset groups is not optimal because there are several factors that influence the politicalparticipation of the Bambapula Village community, namely education, factors, level of employment, level of kinship and level of position.

Pendahuluan

Politik siber berkaitan secara langsung dengan ruang siber. Dalam ruang siber terdapat sebuah bentuk-bentuk yang dapat menjelaskan seperti apa ruang siber itu. Timbulnya sebuah isu-isu menjadikannya dalam bentuk terminologi yang

menunjukkan latar belakang proses pengambilan keputusan oleh pemerintahan negara. Politik siber berhubungan erat dengan bentuk kegiatan-kegiatan politik, seperti partisipasi politik, pendidikan politik, kampanye politik, implementasi demokrasi, komunikasi politik, kampanye politik, keamanan dan pertahanan sebuah negara. Selain itu, politik siber berkaitan juga dengan sosial, budaya, dan juga masyarakat (Aji & Indrawan, 2019)

Politik siber dengan demikian sangat terkait dengan media digital. Menurut Hasfi dijelaskan bahwa media digital membuka ruang komunikasi dan partisipasi politik dengan meningkatkan kemungkinan interaksi antara elemen penting didalamnya yakni partai dan institusi negara yang disebut sebagai elite dan warga negara atau non-elite. Ruang siber merupakan sebuah bentuk sinyal atas terjadinya kemajuan modernitas dalam konteks postmodernis (Hasfi, 2019).

Ada banyak sekali bentuk media, khususnya media sosial, di dalam perkembangan teknologi dan informasi. Beberapa contoh yang paling terkenal, seperti, Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Media sosial memberi kemudahan untuk membagikan data sebagai bentuk diseminasi informasi kepada khalayak luas. Kehadiran media sosial juga membuat para penggunanya lebih mengerti keadaan di negaranya, maupun di luar negaranya. Dengan adanya media sosial ini, masyarakat mudah untuk mencari informasi di ranah daring tentang politik. Begitu pula para politisi untuk melakukan kegiatan dan aktivitas politiknya secara daring. Kemajuan teknologi, khususnya penggunaan media sosial akhirnya mempermudah umat manusia untuk mengakses informasi apa pun yang tersedia secara daring, dalam hal ini khususnya informasi-informasi tentang politik.

Jadi, menurut penulis kajian politik siber sangat diperlukan dalam perkembangannya di mana aktivitas politik masyarakat sudah mulai beralih dari yang sifatnya konvensional bergeser dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam ruang siber. Kondisi demikian merupakan bagian dari transformasi masyarakat untuk menjadi lebih kreatif dan kritis, namun tetap bertanggung jawab atas konten-

konten yang disampaikan dalam ruang siber, yang sejalan dengan perkembangan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat yang diharapkan semakin meningkat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dengan detail objek dan subjek penelitian, yang dapat mencakup individu, lembaga, masyarakat, dan sebagainya. Proses ini didasarkan pada hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, peneliti memberikan argumentasi yang kuat terkait dengan temuan lapangan dan menghubungkannya dengan konsep operasional serta undang-undang yang relevan dengan masalah penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci dengan cermat karakteristik dan dinamika dari fenomena yang sedang diteliti, serta memberikan interpretasi yang mendalam terhadap hubungannya dengan kerangka konseptual dan aspek hukum yang terkait.

Sumber data penelitian didasarkan pada data awal yang dikumpulkan secara langsung dari informan tentang obyek yang diteliti di lapangan. Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, berita yang berasal dari media online.

Hasil dan Pembahasan

Secara umum partisipasi politik masyarakat di Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli dapat dikatakan ikut serta dalam kegiatan politik karena adanya tim kampanye, untuk memilih calon mereka. perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut serta aktif dalam kehidupan secara langsung dan tidak langsung dengan memilih pemimpin Negara kedalam kebijakan pemerintah. Malbrath dan Goel (Miriam budiadjo, 2010) membahas tiga aspek dari kegiatan ini yaitu:

Pemberian Suara

Menurut data awal yang ditemukan, peneliti dalam pemilihan kepala desa Bambapula, banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa Bambapula, misalnya mereka yang mencoblos karena kewajiban, sekali 6 tahun, dalam kegiatan politik di desa Bambapula, untuk mendapatkan pemimpin yang baik di desa harus melakukan kegiatan yang harus dilakukan masyarakat untuk menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan politik desa.

Milbrath dan Goel (Miriam Budiardjo, 2010) menjelaskan, bahwa anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dengan memilih atau sebaliknya, dimotivasi oleh keyakinan, bahwa melalui tindakan kolektif kepentingan mereka akan tersalurkan, atau setidaknya di perhatikan, dan mereka dapat berbuat lebih banyak, atau kurang berpengaruh pada aktifitas mereka. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa tindakan mereka memiliki efek politik (keefektifan politik). Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik karena masyarakat semakin sadar bahwa dirinya diperintah, maka masyarakat menuntut untuk ikut bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesadaran ini berawal dari terpelajar, kehidupan yang lebih baik dan orang-orang yang luar biasa, sehingga pilihan kepala desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli sesuai dengan penjelasan Miriam Budiardjo. Berpartisipasi dalam kegiatan politik yang memberikan kesadaran politik kepada masyarakat dengan cara memilih pada saat pemilu, karena semakin mereka menyadari bahwa kegiatan tersebut berdampak signifikan terhadap kehidupan politik mereka, mereka memilih berdasarkan kesadaran mereka memilih pemimpin desa yang baik. Dengan memberikan suara untuk mengarahkan partisipasi mereka dalam aksi politik, orang memilih karena mereka tahu dalam diri mereka bahwa tugas memilih dalam pemilihan, adalah memilih pemerintahan yang baik bagi masyarakat.

Milbrath dan Goel (Miriam Budiardjo, 2010), secara umum diyakini bahwa

semakin, banyak partisipasi masyarakat akan, semakin, baik. dalam pengertian, ini tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan, bahwa warga mengamati dan, memahami isu-isu politik dan, ingin, berpartisipasi dalam kegiatan, tersebut. Disisi lain, rendahnya partisipasi umumnya di anggap sebagai pertanda buruk, karena dapat di artikan, banyak warga negara yang tidak memperhatikan, urusan, Negara. Selain, itu, dikhawatirkan, jika perbedaan, pendapat tidak diungkapkan, dalam masyarakat, kepala Negara akan, kurang tanggap terhadap kebutuhan, dan, keinginan, rakyat dan, cenderung hanya melayani kepentingan, kelompok tertentu saja, secara umum, partisipasi yang rendah dianggap sebagai legitimasi yang rendah.

Selain, mereka yang melakukan satu atau lebih bentuk partisipasi, ada anggota masyarakat yang sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan, politik. Ini kebalikan, dari partisipasi dan, disebut sikap apatis. Alasan, mereka untuk tidak mengikuti pemilu adalah karena ketidak pedulian, atau kurangnya pemahaman, tentang masalah politik. Ada juga yang tidak yakin, bahwa upaya untuk tidak mempengaruhi kebijakan, pemerintah akan, berhasil, dan ada juga yang secara sadar tidak menggunakan, kesempatan, untuk memilih, karena kebetulan, berada di lingkungan, yang dianggap mungkin, terpinggirkan. Di sisi lain, mungkin, saja orang tersebut tersebut tidak memilih karena menurutnya tidak seburuk itu, dan, siapa yang mereka pilih tidak merubah keadaan. Oleh karena itu, ia merasa tidak perlu menggunakan, hak pilihnya.

Menghadiri Rapat Umum

Dalam pemilihan umum, masyarakat dan pemerintah daerah harus bekerjasama, dan pemerintah daerah akan mengadakan rapat umum, dimana masyarakat dan pemerintah harus menyampaikan saran atau kritik kepada pemerintah. Bahwa rapat umum diperlukan dalam pemilihan umum untuk memberikan visi dan misi kepada pemerintah kedepan, apa yang akan mereka lakukan ketika nanti terpilih sebagai kepala desa. Sehingga diperlukan partisipasi

masyarakat dalam pertemuan-pertemuan public yang diselenggarakan oleh pemerintah dan calon kepala desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli tahun 2019.

Milbrath dan Goel (Miriam Budiardjo, 2010), kegiatan yang dapat digolongkan sebagai paertisipasi politik dalam berbagai bentuk dan intensitas. Secara umum, jenis partisipasi dibedakan berdasarkan frekuensi dan intensitasnya. Banyaknya masyarakat yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak memakan banyak waktu dan biasanya atas inisiatif sendiri (misalnya pemungutan suara dalam pemilihan umum). Di sisi lain, hanya sedikit yang aktif dan sepenuh waktu terlibat dalam politik. Kegiatan aktivitas politik termasuk bertindak sebagai pemimpin partai atau kelompok kepentingan.

Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

Pemilihan Kepala Desa menuntut partisipasi politik masyarakat untuk membentuk dan bergabung dengan kelompok-kelompok kepentingan, misalnya partisipasi dalam kegiatan politik desa dan kelompok-kelompok yang dibentuk oleh orang-orang tertentu. kelompok kepentingan yang bersangkutan seperti bergabung dalam kelompok paniti yang dibentuk oleh BPD untuk pemilihan kepala desa, kelompok sukses yang dibentuk oleh calon desa, misalnya pengangkatan dan pembentukan calon kepala desa kelompok tim sukses. Partisipasi politik masyarakat diperlukan untuk membentuk dan menyatukan pemangku kepentingan dalam pemilihan kepala desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli tahun 2019.

Milbrath dan Goel (Miriam Budiardjo, 2010), salah satu penyebabnya adalah masyarakat mulai memahami bahwa hak pilih satu orang (misalannya dalam pemilihan) memiliki efek yang sangat kecil, terutama dinegara-negara jumlah pendukung yang besar. Dengan bergabung berkelompok dengan orang lain, diharapkan masyarakat mau mendengarkan tujuan mereka. Kelompok ini bertujuan

untuk memengaruhi masyarakat agar mau berpartisipasi. Mereka juga tidak memperebutkan kursi parlemen karena merasa badan terlalu umum untuk mengatur masalah yang lebih spesifik. Mereka cenderung fokus hanya pada satu masalah tertentu seperti masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam berkrompok. Mereka sangat krisis terhadap cara politik politisi dan masyarakat yang merasa “terasing” dari pemerintah.

Partisipasi Politik Era Politik Siber

Belakangan ini istilah siber semakin sering terdengar oleh telinga kita sebagai sebuah bentuk pengamanan, pengawasan dan juga pelayanan dalam era digital saat ini. Mulai dari *egovernment* hingga bentuk politik siber yang digunakan sebagai bentuk atas pelayanan dan informasi terkait perpolitikan di daerah tersebut. Menurut tulisan yang disampaikan oleh Nazli Choucri, yang dikutip dari Indrawan, menurutnya politik siber adalah sebuah terminologi yang diciptakan, berkaitan dengan interaksi manusia (politik) yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang dimungkinkan untuk terjadi melalui ranah ruang siber sebagai sebuah arena baru pertarungan dengan pengandai-andaian dan realitanya sendiri (Indrawan, 2019).

Setelah mengetahui dengan adanya internet bisa membuka wawasan masyarakat untuk lebih bisa berpikir secara rasional terkait isu-isu pemberitaan pada pemerintahan dan politik. Banyaknya sudut pandang yang dihasilkan oleh internet kepada pembacanya bisa menimbulkan adanya suatu permasalahan. Permasalahan ini sering kali dikaitkan dengan rasa tidak setuju dengan opini yang disampaikan oleh sudut pandang yang lainnya di sebuah wilayah dalam bernegara, dari setiap opini yang dibuat dapat menghasilkan sebuah pemikiran terbaru terkait makna dari permasalahan tersebut.

Perkembangan teknologi dan informasi di era saat ini tidak lagi hanya lah menggunakan media seperti, media cetak dan lainnya, namun saat ini sudah beragam

bentuk dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dikenal juga dengan media digital. Kemajuan yang dihasilkan oleh teknologi itu sendiri berimbas juga kepada faktor pemerintahan dan juga politik di suatu negara. Sebelum mengalami perkembangan yang begitu drastis, pada dasarnya konsep dari teknologi sendiri sudah muncul sejak era 1960 an, yang semakin lama terjadilah sebuah eksperimen internet pada saat itu, yang menghasilkan perkembangan yang pesat saat ini (Herdyanto, 2019).

Penggunaan internet menjadi salah satu poin penting dalam teknologi, dengan tingkat pemakaian internet di setiap daerah dalam negara Indonesia mengalami peningkatan yang dratis tingginya. Menurut data yang disampaikan oleh sekretaris Jenderal APJII Henri Kasyfi Soemartono, yang dikutip dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa penggunaan internet naik dari 64,8% tahun 2018 menjadi 73,7% tahun 2019 (Kominfo, 2020).

Dijelaskan diatas bahwa dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia hampir dalam hitungan sekitar 272,1 Juta penduduk yang mendiami daerah Indonesia, dari jumlah penduduk yang berada di Indonesia memungkinkan adanya tingkat peningkatan grafik terkait penggunaan internet yang tinggi juga yaitu berkisar 175,3 Juta penduduk yang terdapat di Indonesia pada saat itu. Dengan jumlah penetrasinya sekitar 64% ini juga memungkinkan adanya tingkat penggunaan sosial media yang berkisar hingga 160 Juta dengan jumlah telepon pintar yang telah terdaftar dan mendapatkan koneksi oleh internet sekitar 338,2 Juta (Saputra, 2020).

Internet di Indonesia jelas telah meningkat yang dapat juga berpengaruh baik secara positif dan juga negatif kepada pemerintahan politik di Indonesia. Dalam kegiatan perpolitikan tidak lah terlepas dari sebuah kegiatan yang dinantikan oleh warga Negara sebagai ajang bentuk dipilih dan memilih setiap lima tahunnya, kegiatan tersebut dikenal juga dengan pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurut Rahmatunnisa (2017) terdapat fenomena yang dimiliki oleh pemilihan

umum yang mana semakin menjadi sebuah fenomena global, yaitu pemilu masih menjadi bahan topik pembicaraan di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini membuat isu-isu kepemiluan selalu menjadi *trending topic* dunia, dimana pun pemilu diadakan, apalagi di negara dengan ratusan juta penduduk seperti kita. Baik di dalam negara maju maupun berkembang, pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai. Dalam pemilu yang akan dilaksanakan sudah pasti memerlukan sebuah partisipasi dan peran aktif dari masyarakat.

Berikutnya, peran masyarakat dalam politik siber menjadi penting karena penulis berpendapat, pendidikan politik siber adalah kunci menjaga demokrasi bersih dari segala halhal yang negatif dan hoaks. Ranah yang berwarna abu-abu ini harus dipenuhi oleh netizen yang cerdas sehingga jika muncul konten negatif atau hoaks, kontra-isunya langsung muncul untuk menanggapi konten-konten tersebut. Pemerintah di negara-negara demokratis harus bekerja berdasarkan parameter kebebasan berbicara untuk membangun daya tahan dan penangkalan (Aji & Indrawan, 2019).

Membangun sebuah komunitas masyarakat yang sehat digital, yang dapat dengan cepat merespons ancaman terhadap demokrasi siber yang muncul, adalah hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Tidak seperti negara-negara otoriter yang mengandalkan pada solusi *top-down*, demokrasi memiliki keunggulan untuk melahirkan solusi langsung dari akar rumput untuk menangani masalah yang ada dalam politik siber. Solusi tidak harus datang dari pusat atau diarahkan dari sebuah regulasi yang kuat atau memaksa. Masyarakat, atau katakanlah *civil society*, dapat memanfaatkan pendidikan politik siber untuk membangun sebuah kontranarasi yang positif, termasuk memberikan penyadaran-penyadaran digital kepada masyarakat agar memahami politik siber, dengan demikian juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ranah tersebut (Aji & Indrawan, 2019).

Politik digital dalam kaitannya dengan peningkatan jumlah partisipasi juga disebabkan makin maraknya bentuk media sosial. Dalam partai politik juga telah

memiliki beberapa bentuk media sosial seperti akun *facebook*, *Twitter* dan *YouTube*. Sekalipun penggunaannya memang belum merata seluruh partai politik, tetapi paling tidak semua partai politik di Indonesia saat ini sudah memiliki akun media sosial (Anshari, 2013).

Hal ini sesuai dengan teori *Cyberpolitics*, karena berkaitan dengan interaksi manusia (politik) yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang dimungkinkan untuk terjadi melalui ranah ruang siber sebagai sebuah arena baru pertarungan dengan pengandaian dan realitanya sendiri. Meskipun ada perbedaan dalam perspektif di seluruh dunia, namun tetap terdapat pemahaman ilmiah umum tentang arti “politik”. Kompleksitas yang muncul terkait awalan “*cyber*” itulah yang membedakan semantik yang baru dibangun ini. Artinya, penggunaan media sosial untuk kepentingan politik sesuai dengan realita baru kegiatan-kegiatan politik yang terjadi di ranah siber.

Kemudian, masyarakat dapat memainkan empat peranan penting dalam politik siber. Pertama, mereka dapat memainkan peran sebagai anjing penjaga (*watchdog*), yang mengawasi media sosial, termasuk hoaks atau kampanye hitam yang muncul. Kedua, masyarakat dapat membantu memberikan informasi kepada warganet melalui program-program literasi media. Ketiga, masyarakat dapat menekan perusahaan, bisnis, atau platform media sosial, yang sadar atau tidak, bertanggung jawab menampilkan atau menyebarkan konten yang menyesatkan. Keempat, masyarakat dapat bekerja sama dengan semua *stakeholder* di bidang politik siber untuk menciptakan kondisi yang kondusif, serta memperbaiki ranah siber dari kondisi-kondisi ketidakpercayaan, polarisasi, sampai penyebaran hoaks dan kampanye hitam. Mencari satu suara yang sama terkait iklim demokrasi siber yang sehat juga dilakukan agar ancaman otoritarianisme tidak lagi muncul di era demokrasi siber yang berkembang sangat masif ini (Schafer, 2018).

Peran masyarakat dalam politik siber pun saat ini makin gencar dilakukan. Dalam hal ini, penulis ingin khusus mengamati kalangan masyarakat dari generasi

milennial (usia di bawah 29 tahun). Sekalipun harus diakui generasi milenial saat ini masih sedikit sekali yang tertarik isu-isu politik. Sebuah fakta yang dipotret dari penelitian CSIS, bahwa hanya 2.3% generasi milenial yang tertarik untuk membahas isu-isu politik. Olahraga dan musik menjadi dua hal yang paling menarik perhatian generasi milenial. Namun, di penelitian yang sama, lebih dari 80% generasi milenial percaya bahwa pemerintah akan mampu membawa kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan. Bahkan, tingkat optimisme mereka terhadap masa depan mencapai 94.8% (Aji & Indrawan, 2019).

Sebuah fakta yang miris sebenarnya, akan tetapi dari sisi penulis, justru membangkitkan tantangan tersendiri bagi aktivitas politik dalam ruang siber, mengapa? Karena di penelitian yang sama, CSIS juga menanyakan penetrasi generasi milenial terhadap sumber informasi, di mana 54.3% milenial mendapat informasi dari media daring. Kemudian, tingkat kepemilikan akun media sosial pun tinggi, mencapai di atas 80% (Facebook yang tertinggi).

Apa artinya, penulis melihat bahwa ini adalah kesempatan besar untuk mengenalkan politik kepada generasi milenial. Mereka sangat rutin untuk mengakses dunia maya setiap harinya. Hanya saja mereka belum tertarik untuk “meng-klik” berita-berita politik. Kesadaran mereka berpolitik harus ditingkatkan dengan memperbanyak ekspose mereka terhadap konten-konten politik di ruang siber, karena sebenarnya, banyak generasi milenial yang tertarik dunia politik, hanya mereka “kudate”, alias kurang *update*, terkait hal tersebut.

Selanjutnya, dalam sebuah pemilihan umum ada sebuah bentuk perayaan yang mana sebagai ajang kontestasi dan juga dapat digunakan sebagai ajang penyampaian visi dan misi dari setiap calon yang akan dipilih. Aktivitas tersebut sering kali terdengar dengan sebutan kampanye politik, yang digunakan sebagai sebuah bentuk promosi kandidat pada saat ada acara pemilihan umum. Kampanye ini menurut penulis saat ini sudah banyak menggunakan media digital.

Kampanye merupakan sebuah bentuk atas persiapan untuk melakukan sebuah

pertandingan politik dimana para kandidat berlomba-lomba untuk menarik perhatian masyarakat untuk memilih dirinya atau partai politiknya. Hal seperti ini terjadi karena semakin banyak suara yang didapatkan maka pemenang akan mendapatkan sebuah kewenangan dan juga kewajiban untuk menduduki kursi kekuasaan dalam bentuk sebuah pemerintahan (Fatimah, 2018).

Kemudian, kampanye menurut Sayuti (2014), adalah sebuah bentuk usaha terorganisasi yang berusaha untuk mempengaruhi sebuah proses-proses pembuatan keputusan di dalam kelompok spesifik. Kampanye juga merupakan salah satu bentuk yang digunakan untuk berkomunikasi politik yang disampaikan oleh aktor kepada pendengar.

Bentuk-bentuk kampanye saat ini memiliki dua bentuk, yaitu secara dalam jaringan dan luar jaringan seperti kegiatan tatap muka antara calon kandidat dengan masyarakat sebagai pemilih dalam kegiatan demokrasi. Kampanye Politik biasanya dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dan rapat-rapat umum yang berisi berbagai pidato, pembicaraan, penyampaian slogan-slogan atau dalam bentuk penyebaran barang-barang cetakan, rekaman yang berisi sebuah bentuk ajakan, bujukan, gambar dan juga bisa berupa simbol-simbol khusus dalam kelompok politik tersebut (Efriza & Indrawan, 2018).

Selain dilaksanakan secara tatap muka, kampanye juga bisa dijalankan dalam bentuk daring (dalam jaringan). Menurut tulisan yang dikemukakan oleh Efriza dan Indrawan (2018), menjelaskan terkait bentuk kampanye yang dilaksanakan secara daring, sebab semakin tingginya perkembangan teknologi dan informasi membuat semuanya dapat terasalebih mudah dan lebih efisien. Bentuk kampanye di era politik digital dapat dilaksanakan menggunakan media internet. Bentuk kampanyenya dapat berupa sebuah ajakan yang disampaikan di dalam blog atau tulisan elektronik, lalu bisa juga menggunakan situs seperti situs resmi dari partai politik dan lainnya, selain itu juga kampanye secara daring juga dapat memanfaatkan kecanggihan dari media sosial, seperti media *facebook*, *twitter*, *Instagram*. Bentuk pengemasan informasi secara

daring juga dapat tertata dengan rapih sebab kemajuan teknologi dan kecepatan akses sebuah informasi seperti halnya bentuk informasi ajakan untuk mendukung organisasi atau individu tertentu sesuai dengan pilhan yang didapatkan dengan hati nurani tiap individu.

Keuntungan yang diperoleh dari adanya kampanye daring yaitu, melakukan kampanye daring dapat menghemat pengeluaran dana yang biasanya dibutuhkan untuk kampanye tatap muka yang membutuhkan dana lebih besar, namun dengan melaksanakan kampanye daring para kandidat dapat menghemat pendanaan yang digunakan pada saat pelaksanaan kampanye tatap muka (Farisa, 2020). Dengan kampanye daring juga tidak adanya keterbatasan dalam hal jumlah yang akan ikut dalam pelaksanaan kampanye partai politik dan individu perorangan, sebab internet dapat membuat ruangan komunikasi politik menjadi lebih luas. Jika menggunakan metode kampanye daring, masyarakat bisa mengikuti kegiatan kampanye tersebut tanpa harus kepanasan dan menimbulkan kerumunan yang begitu besar, apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini. Tentunya hal ini dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat di era politik siber dewasa ini.

Kekurangan kampanye daring terjadi apabila masih ada daerah pemilihan yang masih sulit terkoneksi dalam jaringan internet. Kondisi demikian merupakan poin penting sebab internet adalah hal yang penting dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan secara daring. Penyelenggaraan suatu pemilihan umum dapat terlaksana dengan baik dan sukses jika layanan internet berfungsi memadai dan dapat diakses di seluruh tempat pemilihan.

Peningkatan partisipasi politik diartikan bahwa negara harus memiliki bentuk pemerintahan yang bersifat demokratis yang mana harus bekerja berdasarkan parameter kebebasan berbicara (Aji & Indrawan, 2019). Peran masyarakat dalam demokrasi yang saat ini bersifat siber juga penting, sebab kalangan masyarakat saat ini ada sebuah generasi yang dikenal dengan generasi milenial yang mana ketertarikannya pada isu-isu politik masih terbilang rendah dan yang berminat hanya

sekitar 2.3%. Akan tetapi bentuk partisipasi politik terhadap pemerintah yang dianggap dapat membawa kesejahteraan percaya hingga kisaran 80% dengan optimisme 94.8% terhadap masa depan (Aji & Indrawan, 2019).

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di era siber mengalami peningkatan, khususnya melalui sarana-sarana daring. Sarana-sarana tersebut, adalah peningkatan kampanye daring yang banyak dilakukan melalui media sosial. Akses media sosial yang luas dan mudah membuat kampanye jenis ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya partisipasi politik masyarakat di era politik siber. Temuan penulis ini berhubungan erat dengan teori *Cyberpolitics* yang mensyaratkan adanya aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan melalui ranah siber.

Terakhir, sebagai penutup, politik siber memang bukan wacana baru dalam diskusi publik. Kebaruan (*novelty*) dalam diskusi tersebut adalah pembahasan tentang peluang dan risikonya bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam arti luas, kontribusi politik siber berupa peningkatan kesadaran politik warga negara, penguatan otonomi diri dalam pengambilan keputusan politik, dan pematangan etika sosial untuk kehidupan multikultural, sehingga meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dalam arti khusus, politik siber meningkatkan interaksi antara masyarakat dan negara, antara warga negara dan perwakilan politiknya, atau antara kelompok kepentingan dan komunitas pembuat kebijakan di tingkat pemerintahan.

Kesimpulan

Perkembangan dunia siber sudah sangat marak dewasa ini. Hal ini diawali dengan adanya internet yang merupakan suatu inovasi teknologi yang menyebabkan manusia lebih mudah untuk berinteraksi dalam arus komunikasi dan informasi dengan akses yang lebih cepat dan memiliki daya jangkauan luas. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi oleh masyarakat menyebabkan terciptanya ruang baru untuk saling berinteraksi yang disebut dengan *cyberspace* (ruang siber).

Politik siber berhubungan erat dengan bentuk kegiatan-kegiatan politik, seperti

partisipasi politik, pendidikan politik, kampanye politik, implementasi demokrasi, komunikasi politik, kampanye politik, keamanan dan pertahanan sebuah negara. Selain itu, politik siber berkaitan juga dengan sosial, budaya, dan juga masyarakat. Kajian politik siber sangat diperlukan dalam perkembangannya di mana aktivitas politik masyarakat sudah mulai beralih dari yang sifatnya konvensional bergeser dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam ruang siber. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat yang diharapkan semakin meningkat.

Masyarakat dapat memainkan empat peranan penting dalam politik siber. Pertama, mereka dapat memainkan peran sebagai anjing penjaga (*watchdog*), yang mengawasi media sosial, termasuk hoaks atau kampanye hitam yang muncul. Kedua, masyarakat dapat membantu memberikan informasi kepada warganet melalui program-program literasi media. Ketiga, masyarakat dapat menekan perusahaan, bisnis, atau platform media sosial, yang sadar atau tidak, bertanggung jawab menampilkan atau menyebarkan konten yang menyesatkan. Keempat, masyarakat dapat bekerja sama dengan semua *stakeholder* di bidang politik siber untuk menciptakan kondisi yang kondusif, serta memperbaiki ranah siber dari kondisi-kondisi ketidakpercayaan, polarisasi, sampai penyebaran hoaks dan kampanye hitam.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di era siber mengalami peningkatan, khususnya melalui sarana-sarana daring. Sarana-sarana tersebut, adalah peningkatan kampanye daring yang banyak dilakukan melalui media sosial. Akses media sosial yang luas dan mudah membuat kampanye jenis ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya partisipasi politik masyarakat di era politik siber. Temuan penulis ini berhubungan erat dengan teori *Cyberpolitics* yang mensyaratkan adanya aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan melalui ranah siber. Politik siber memang bukan wacana baru dalam diskusi publik. Kontribusi politik siber berupa peningkatan kesadaran politik warga negara, penguatan otonomi diri dalam pengambilan keputusan politik, dan pematangan etika sosial untuk kehidupan

multikultural, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam arti khusus, politik siber meningkatkan interaksi antara masyarakat dan negara, sehingga berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat secara umum.

Referensi

- Aji, P. M., & Indrawan, J. (2019). *Cyberpolitics: Perspektif Baru Memahami Politik Era Siber*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Anshari, A. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial. *Jurnal Komunikasi* 8(1), 91-101.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
- Efriza., & Indrawan, J. (2018). *Komunikasi Politik Pemahaman secara Teoretis dan Empiris*. Malang: Intrans Publishing
- Farisa, F. C. (2020, Juni 19). *Menurut Bawaslu Ini Kelebihan Dan Kekurangan Kampanye Daring*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/19/17352881/menurut-bawaslu-inikelebihan-dan-kekurangan-kampanye-daring?page=all> (23 Januari 2021).
- Fatimah, S. (2018). *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5-16. <https://doi.org/10.2489/resolusi.v1i1.154>
- Herdyanto, A. (2019, Juli 31). *Ini 6 Fakta Sejarah Awal Mula Internet di Dunia, Nyawanya Era Digital*. <https://www.idntimes.com/tech/trend/abrahamherdyanto/sejarah-awal-mula-internet/1> (21 Januari 2021).
- Indrawan, J. (2019). Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber. *Jurnal Politica*, 10(1), 1-15. 10.22212/jp.v10i1.1315
- Kominfo. (2020). *Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital*. Online. https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-penggunainternet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker 23 Januari 2021.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1-11. <http://skpp.jatim.bawaslu.go.id/images/cart/RI/JURNAL/JURNAL%20MENGAAPA%20INTEGRITAS%20ITU%20PENTING.pdf>
- Saputra, B. (2020, September). *Infografis Pengguna Internet Indonesia 2020*. <https://www.validnews.id/Infografis-Pengguna-Internet-Indonesia-2020-4k> (21 Januari 2021).

Schafer, B. (2018). *A Democratic Response to Digital Disinformation: The Role of Civil Society*, dalam AICGS Policy Report: Moving Beyond Cyber Wars: A Transatlantic Dialogue. Washington: American Institute for Contemporary German Studies John Hopkins University & Hanns Seidel Stiftu

JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan

Vol 1, No. 1, 2024, pp. 00-00

<https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jsip/index>

©Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAD

